

URGENSI PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBANGUN KESEHATAN MORAL MASYARAKAT

Baharudin¹⁾, Nur Latifah²⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

²⁾ STID Al-Islahuddiny, Indonesia.

baharudin@uinmataram.ac.id

Abstrak

Dalam pendidikan, aspek moral peserta didik merupakan aspek yang utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi pendidikan moral dalam membangun Kesehatan moral masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persoalan moralitas, dalam proses pendidikan, setidaknya ada tiga komponen yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, moralitas meliputi disiplin, yakni suatu perasaan akan otoritas yang melawan dorongan-dorongan hati yang idiosinkritik. Kedua, moralitas meliputi kelekatan kepada masyarakat karena masyarakat adalah sumber moralitas seseorang. Ketiga, moralitas meliputi otonomi, suatu perasaan akan tanggung jawab individual atas tindakan-tindakan seseorang

Kata Kunci : urgensi pendidikan moral, membangun kesehatan moral, masyarakat

1. PENDAHULUAN

Membahas tentang moralitas tentu tidak dapat dipisahkan dengan sosiolog Emile Durkheim. Durkheim adalah seorang sosiolog yang memberikan perhatian khusus terhadap moralitas. Durkheim memberikan perhatian terhadap moralitas terletak pada fondasi sosiologi sebagai suatu disiplin. Perhatian Durkheim akan pentingnya moralitas, karena ia menyadari bahwa terjadi suatu krisis moral yang luas di tengah-tengah masyarakat pada era modern, terutama setelah terjadi revolusi Prancis. Revolusi Prancis telah mengumumkan fokus pada hak-hak individu yang sering mengungkapkan diri sebagai suatu serangan kepada otoritas tradisional dan kepercayaan-kepercayaan agamis. Trend itu berlanjut bahkan setelah jatuhnya pemerintahan revolusioner. Pada pertengahan abad 19, banyak orang merasa bahwa tatanan sosial terancam karena orang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan masyarakat (George Ritzer, 2012)

Perhatian mendasar Durkheim tentang moralitas terkait dengan definisinya yang aneh

mengenai *kebebasan*. Dalam pandangan Durkheim manusia terancam melakukan pelanggaran (patologis) ikatan-ikatan moral. Ikatan-ikatan moral itu penting bagi Durkheim, karena tanpa itu individu akan dipaksa oleh nafsu-nafsu mereka untuk mengusahakan pemuasan yang membabi buta, tetapi pemuasan yang baru hanya akan membawa kepada kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak. Menurut Durkheim, satu hal yang akan selalu diingatkan setiap orang yang ialah menjadi "lebih". Dan tentu saja, itulah hal yang tidak pernah seseorang punyai. Jika masyarakat tidak membatasi seseorang, maka seseorang akan menjadi budak bagi pengejaran hal yang lebih baik. Karena itu, Durkheim menganut pandangan yang tanpak paradoksikal bahwa individu membutuhkan moralitas dan kendali eksternal agar dapat menjadi bebas. Pandangan atas hasrat tidak terpuaskan itu yang ada pada setiap inti manusia, sentral bagi sosiologinya (Emile Durkheim, 1925).

Bagi Durkheim, moralitas memiliki dua aspek, *pertama*, bagi Durkheim moralitas adalah suatu fakta sosial. Dengan kata lain bahwa moralitas dapat dipelajari secara empiris, eksternal

bagi individu, bersifat memaksa individu, dan dijelaskan oleh fakta-fakta sosial yang lain. Hal itu berarti bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang dapat difilsafati orang, tetapi sesuatu yang harus dipelajari sebagai suatu fenomena empiris. Hal itu khususnya benar karena moralitas berhubungan erat dengan struktur sosial. Untuk memahami moralitas suatu lembaga tertentu, Anda *terlebih dahulu mempelajari* cara lembaga itu dibentuk, cara menerima bentuknya yang sekarang, bagaimana tempatnya di dalam struktur keseluruhan masyarakat, bagaimana berbagai kewajiban kelembagaan dihubungkan dengan kebaikan sosial, dan seterusnya.

Kedua, Durkheim adalah sosiolog moralitas, karena studi-studinya didorong oleh perhatiannya kepada "kesehatan" moral masyarakat modern. Banyak sosiologi Durkheim dapat dilihat sebagai produk sampingan perhatian kepada isu-isu moral, Sungguh, seorang kolehan Durkheim menulis di dalam tinjauan mengenai karya seumur hidup Durkheim bahwa "orang gagal memahami karya-karyanya jika tidak memperhitungkan fakta bahwa moralitas adalah pusat dan obyeknya" (Emile Durkheim, 1925).

Poin kedua tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih banyak jika seseorang ingin mengerti perspektif Durkheim. Durkheim tidak menganggap bahwa masyarakat telah terjadi, atau sedang terancam menjadi, tidak bermoral. Hal itu benar-benar mustahil, karena moralitas bagi Durkheim adalah disamakan dengan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mungkin tidak bermoral, tetapi tentu saja ia dapat kehilangan kekuatan moralnya jika kepentingan kolektif masyarakat menjadi sekedar jumlah total kepentingan-kepentingan diri. Hanya pada tingkat bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial maka ia dapat memaksakan kewajiban kepada para individu yang menggantikan kepentingan diri mereka. Akibatnya, Durkheim percaya bahwa masyarakat membutuhkan suatu moralitas umum yang kuat. Seperti apa seharusnya masyarakat kurang mendapat perhatiannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini menggunakan cara untuk

menyelesaikan persolan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Moral

Berkaitan dengan moral, Durkheim memulai pembahasan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan moral? Moralitas meliputi konsistensi, keteraturan tingkah laku. Apa yang menjadi moral hari ini akan menjadi moral esok hari. Moralitas juga meliputi pengertian wewenang. Seseorang dipaksa untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, seseorang merasakan perlawanan terhadap implus-implus yang tidak masuk akal. Kedua ciri moralitas ini--tingkah laku dan wewenang--sebenarnya merupakan dua aspek dari satu hal, yaitu disiplin (penyatuan aspek-aspek yang berbeda atau bertentangan dari realitas dalam sebuah konsepsi adalah suatu kiat yang digemari Durkheim).

Berkaitan dengan pendidikan moral, Durkheim melihat masalah-masalah di dalam masyarakat modern sebagai penyimpangan-penyimpangan temporer dan bukan sebagai kesulitan-kesulitan yang alami. Durkheim sangat percaya pada pembaharuan sosial. Dalam mengambil pendirian tersebut, dia berlawanan dengan kaum konservatif dan radikal di zamannya. Kaum konservatif tidak melihat adanya harapan di dalam masyarakat modern dan sebagai gantinya mengusahakan pemulihan monarkhi atau kekuasaan politik Gereja Katolik Roman. Kaum radikal seperti para sosialis di masa Durkheim setuju bahwa dunia tidak dapat diperbaharui, tetapi mereka berharap bahwa revolusi akan mewujudkan sosialisme dan komunisme (Emile Durkheim, 1925).

Baik program-program Durkheim untuk pembaharuan maupun pendekatan reformisnya disebabkan oleh kepercayaannya bahwa masyarakat adalah sumber dari setiap moralitas. Program-program pembaharuannya dititik-tekan pada fakta bahwa masyarakat perlu menghasilkan pengaruh moral bagi individu. Karena itu, masyarakat sedang kehilangan kepastiannya, ia harus direformasi. Pendekatan-pendekatan reformasinya didiktekan oleh fakta bahwa sumber setiap reformasi seharusnya

adalah masyarakat yang ada secara aktual. Tidak baik merumuskan program-program pembinaan dari sudut pandang suatu moralitas yang abstrak. Program itu harus dihasilkan oleh kekuatan-kekuatan sosial masyarakat itu dan bukan dari filsuf, atau bahkan sistem etis sosiologi. "Cita-cita tidak dapat disahkan ke dalam eksistensi, itu harus mengerti, dicintai, dan diperjuangkan oleh badan yang bertugas untuk mewujudkannya.

Durkheim menawarkan kursus-kursus dan memberi kuliah-kuliah publik mengenai pendidikan moral dari sosiologi moral. Selain itu dia maksudkan, seandainya hidup cukup lama, untuk memuncakkan karya seninya dengan suatu presentasi komprehensif ilmunya mengenai moral. Hubungan yang dilihat Durkheim antara sosiologi dan moralitas, baru berakhir ini dihargai oleh sebagian besar sosiolog:

"Tampak bagi saya, bukan suatu kebetulan bahwa penekanan baru pada Durkheim pasti berada di wilayah moralitas, filsafat dan pergaulan intelektual, hal ini menandakan kebutuhan reflektif sosiologi yang sedang bertumbuh untuk masalah-masalah ontologis, kebutuhan yang menghubungkan keprihatinan-keprihatinan profesional dengan situasi sosio-historis profesi itu. Sementara baru satu dasawarsa atau lebih yang lalu banyak sosiolog mungkin merasa malu..." (Emile Durkheim, 1925).

Meskipun Durkheim secara sentral memerhatikan moralitas, namun tidak mudah mengklasifikasikan teori moralitasnya menurut kategori-kategori yang khas. Pada satu sisi, dia adalah seorang relativis moral yang percaya bahwa aturan-aturan etis benar-benar dan harus berubah dalam menjawab fakta-fakta sosial yang lain. Pada sisi lainnya, dia adalah seorang taradisonalis karena dia tidak percaya bahwa orang-orang benar-benar dapat menciptakan suatu moralitas yang baru. Setiap moralitas yang harus hanya dapat bertumbuh dari tradisi-tradisi moral kolektif seseorang. Dia menegaskan bahwa orang harus "melihat di dalam moralitas itu sendiri suatu fakta yang harus diselidiki hakikatnya dengan penuh perhatian, bahkan dengan penuh hormat, sebelum berani untuk memodifikasi" (Emile Durkheim, 1973).

Teori moralitas sosiolog Durkheim melampaui pendirian-pendirian mengenai

moralitas masa kini dan memberikan kemungkinan akan suatu perspektif yang segar mengenai perdebatan kontemporer atas isu-isu seperti keluarga-keluarga tradisional dan muatan moral kebudayaan populer. Bagi Durkheim, moralitas mempunyai tiga komponen, *pertama*, moralitas meliputi disiplin, yakni suatu perasaan akan otoritas yang melawan dorongan-dorongan hati yang idiosinkritik. *Kedua*, moralitas meliputi kelekatan kepada masyarakat karena masyarakat adalah sumber moralitas seseorang. *Ketiga*, moralitas meliputi otonomi, suatu perasaan akan tanggung jawab individual atas tindakan-tindakan seseorang (Emile Durkheim, 1986).

1. Semangat Disiplin

Durkheim biasanya mendiskusikan disiplin dalam kerangka pengendalian atas dorongan-dorongan hati egoistik seseorang. Pengendalian demikian perlu karena kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan kelompok tidak sama dan mungkin, setidaknya dalam jangka waktu yang singkat, bertentangan. Disiplin menghadapkan seseorang dengan tugas moralnya yang bagi Durkheim adalah tugas seseorang kepada masyarakat. Disiplin sosial juga membuat individu lebih bahagia karena membatasi keinginan-keinginannya yang tidak terbatas sehingga memberikan kesempatan satu-satunya untuk bahagia karena kalau tidak ia akan selalu menginginkan hal yang lebih.

Menurut Durkheim moralitas bukan hanya sekedar sistem perilaku yang sudah merupakan kebiasaan. Ia adalah suatu sistem perintah. Emile Durkheim telah menegaskan bahwa perilaku yang tidak tetap, secara moralitas dianggap tidak lengkap. Demikian pula halnya moralitas dengan pada kaum anarkis. (Istilah ini digunakan mengacu kepada orang yang sama sekali tidak merasakan adanya realitas imperatif moral, orang yang menderita semacam penyakit buta warna, dengan demikian semua daya moral dan intelektual baginya sama saja). Di sini seseorang dihadapkan dengan unsur lain dari moralitas; selain unsur keteraturan, pada dasar kehidupan moralitas tersebut terjalin erat, dan jalinan kedua unsur tersebut berasal dari ide yang lebih kompleks yang merangkum keduanya, yakni

konsep mengenai disiplin. Disiplin inilah yang pada kenyataannya mengatur perilaku. Disiplin merangkum perilaku yang selalu terulang dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun disiplin tidak mungkin timbul tanpa ada otoritas, yakni otoritas yang mengaturnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah unsur fundamental dari moralitas (Emile Durkeim, 1986).

Biasanya disiplin dianggap berguna karena berkaitan dengan perilaku yang membawa akibat yang berguna. Disiplin hanyalah sarana untuk merinci dan mempertegas perilaku yang diperintahkan. Jadi perilaku merupakan sumber bagi *raison d'etre-nya*. Adalah suatu hal yang baik apabila orang mempunyai semangat disiplin, terlepas dari berbagai tindakan yang menurut perasaannya dipaksakan padanya. Mengapa? disinilah perlunya seseorang membahas masalah ini karena disiplin dan kaidah sering dirasakan sebagai paksaan, yang mungkin memang perlu, tapi bagaimanapun suatu keburukan yang patut disayangkan yang harus diketahui oleh setiap orang bagaimana harus menghadapinya sambil berusaha untuk membatasinya seminimal mungkin.

Lalu bagaimana fungsi moralitas pengaruhnya pada pendidikan anak. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa, pada dasarnya moralitas adalah suatu disiplin. Semua disiplin mempunyai tujuan ganda: mengembangkan suatu keteraturan tertentu dalam tindak-tanduk manusia dan memberikannya suatu sasaran tertentu yang lebih mengutamakan hal-hal yang merupakan kebiasaan dan juga membatasinya. disiplin mengatur dan memaksa. Disiplin menjawab segala sesuatu yang selalu terulang dan bertahan lama dalam hubungan antar-manusia. Karena kehidupan sosial mempunyai unsur-unsur yang bersifat umum dan karena hal-hal yang sama dari lingkungan seseorang selalu terulang secara periodik, maka wajarlah bila cara-cara bertindak tertentu--yakni yang ternyata paling sesuai dengan masalah yang dihadapi--juga selalu terulang secara teratur. Keteraturan relatif dari berbagai situasi di mana seseorang berada itulah yang menunjukkan keteraturan relatif dari tingkah laku seseorang.

Disiplin berguna bukan hanya demi kepentingan masyarakat sebagai suatu sasaran mutlak tanpa mana suatu kerja sama mustahil teratur, melainkan juga demi kesejahteraan individu sendiri. Melalui disiplin seseorang belajar mengendalikan keinginan, tanpa ini mustahil orang dapat mencapai kebahagiaan. Dengan demikian, disiplin sangat membantu perkembangan suatu hal yang amat penting bagi diri seseorang masing-masing, yakni kepribadian. Kemampuan untuk membatasi berbagai keinginan dan mengendalikan diri sendiri, suatu kecakapan yang seseorang peroleh dalam pendidikan disiplin moral, merupakan syarat mutlak bagi tumbuhnya kemampuan individu yang bertanggung jawab. Peraturan mengajar seseorang untuk membatasi dan menguasai diri, dan karena itu merupakan sarana emansipasi dan kebebasan. Yang lebih penting lagi, dalam masyarakat demokratis seperti masyarakat sekarang ini, mutlak perlu diajarkan pengendalian diri secara menyeluruh kepada anak-anak. Karena dalam hal-hal tertentu kendali-kendali konvensional sudah tidak efektif lagi--kendali-kendali yang dalam suatu masyarakat yang majemuk membatasi hasrat dan ambisi manusia--hanya tinggal disiplin moral saja yang masih mampu memberikan pengaruh untuk mengatur tingkah laku manusia. Sebab pada prinsipnya kini semua jabatan terbuka bagi setiap orang, dorongan terus maju kini dirangsang dan dikobarkan melampaui semua ukuran hingga suatu titik yang nyaris tanpa batas.

Pendidikan harus membantu anak untuk memahami sejak dini bahwa di luar susunan batas-batas tertentu yang membentuk kerangka historis keadilan, masih ada batas-batas yang didasarkan atas sifat hakiki sesuatu, yakni sifat hakiki diri seseorang masing-masing. Hal itu sama sekali tidak berarti bahwa seseorang harus terus-menerus menanamkan sikap pasrahkan dalam diri anak, atau mengalihkannya keinginan-keinginannya yang absah, ataupun mencegahnya untuk melihat situasi yang ada disekitarnya. Pandangan semacam itu sangat bertentangan dengan prinsip dasar sistem sosial seseorang. Tetapi dalam diri si anak harus ditanamkan pengertian bahwa cara mencapai kebahagiaan adalah dengan kondisi setiap pribadi. Kebahagiaan

tidak terletak dalam pemaksaan diri untuk mencapai sasaran yang jauh tak terhingga, yang pada akhirnya juga tidak mungkin tercapai. Tetapi perlu berusaha menyembunyikan ketidakadilan yang ada di dunia, karena ketidakadilan akan selalu ada di dunia ini, seseorang harus menyadarkan anak didik bahwa ia tidak dapat menggantungkan kebahagiaannya pada kekuasaan, pengetahuan atau kekayaan yang tidak terbatas. Sebaliknya, anak didik harus disadarkan bahwa kebahagiaan itu dapat ditemukan dalam situasi-situasi yang sangat berbeda-beda. Anak juga perlu sadar bahwa setiap orang mempunyai suka-dukanya sendiri, dan yang penting adalah menemukan sasaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sasaran itu harus memungkinkan dia untuk mewujudkan hakikat pribadinya tanpa berusaha melampauinya dengan berbagai cara dan tanpa memaksakan diri melewati batas-batas kemampuannya. Terdapat cukup banyak sikap mental yang harus ditanamkan di sekolah dalam diri si anak, bukan karena sikap-sikap tersebut sejalan dengan suatu aturan manapun, melainkan karena sikap-sikap tersebut memang sehat dan akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan moral akan menjadi pengawal untuk menghadapi kekuatan yang brutal dan ketidaktahuan. Akhirnya, seseorang juga tidak boleh melihat dalam pandangan yang cenderung menyatakan perlu adanya kontrol itu itu sebagai tendensi ke arah setagnan. Bergerak menuju sasaran yang jelas, satu demi satu, berarti bergerak maju tanpa henti bukan mandeg. Masalahnya bukan mempertanyakan apakah seseorang harus maju atau tidak, melainkan dengan kecepatan berupa dan bagaimana caranya.

Dengan demikian sampailah seseorang kepada masalah pembenaran disiplin secara rasional. menurut kegunaannya, dan juga menurut aspek-aspek moralitas, yang lebih jelas. Namun harus dicatat bahwa konsepsi seseorang mengenai fungsi moralitas sama sekali berbeda dari konsepsi yang sudah dikenal dari kaum apologis tertentu. Pada kenyataannya, sering terjadi bahwa untuk memajukan kegunaan moralitas, kaum apologis berpijak pada prinsip yang saya kecam

Menarik untuk dicermati gagasan Emile Dirckheim mengenai moralitas, menurut jika seseorang percaya bahwa disiplin itu berguna, dan memang diperlukan oleh setiap orang, hal itu disebabkan karena rupanya memang merupakan tuntutan hakikatnya sendiri. Inilah cara bagaimana biasanya hakikat mewujudkan dirinya, dan bukan cara untuk mengurangi atau merusak hakikat. Sebagaimana makhluk-makhluk lainnya, manusia pun merupakan makhluk terbatas, ia merupakan bagian dari keseluruhan. Secara fisik ia merupakan bagian dari alam semesta, secara moral ia merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, ia tidak bisa, tanpa memperkosa hakikatnya, mencoba mengubah batas-batas yang merintanginya. Karena segala sesuatu yang ada padanya adalah bagian dari kualitas unsur atau kekuasaan ini. Bila seseorang mengatakan bahwa seseorang adalah suatu pribadi, ini berarti bahwa orang itu, berbeda dari orang lainnya. Perbedaan menyiratkan adanya pembatasan. Jadi, bila seseorang berpendapat bahwa disiplin itu baik, itu tidak berarti bahwa seseorang memandang fungsi hakikat dengan mata pemberontak, atau seseorang melihat adanya rencana jahat yang harus digagalkan, tetapi hanya ingin menyatakan bahwa hakikat manusia hanya bisa membangun dirinya sendiri melalui disiplin. Bila seseorang beranggapan bahwa kecederunagn hakikat diberi batasan, itu tidak berarti bahwa seseorang menganggap hakikat itu jahat atau bahwa seseorang ingin membatah hak untuk memperoleh kebahagiaan, justru sebaliknya, karena kalau tidak kecenderungan hakikat sama sekali tidak mempunyai harapan mendapatkan apa yang sepatutnya dapat mereka peroleh. Dengan demikian seseorang temukan konsekuensi praktisnya yang pertama, asketisme itu tidak baik dalam dirinya dan pada dirinya sendiri.

2. Kelekatan pada Kelompok Sosial

Persoalan moralitas memiliki keterikatan atau kelekatan dengan individu pada kelompok sosial di mana ia menjadi anggotanya. Dengan demikian moralitas hanya ada sejauh seseorang menjadi anggota suatu kelompok manusia, apapun juga bentuknya. Karena manusia baru lengkap jika termasuk dalam beberapa

masyarakat, maka secara moral ia pun baru lengkap jika merasa dirinya menyatu dengan kelompok yang berbeda-beda di mana ia terlihat: keluarga, serikat buruh, usaha partai politik, negara, dan umat manusia seluruhnya. Akan tetapi dari segi moral kelompok-kelompok tersebut tidak sama pentingnya dan peranannya dalam kehidupan sosial pun tidak sama. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menyamaratakan semua kelompok tersebut begitu saja. Dari semua kelompok tersebut begitu saja. Dari semua kelompok tersebut ada satu yang utama dan mewakili tujuan *par excellence* dari perbuatan moral. Kelompok itu adalah masyarakat politik, yaitu negara, yang diartikan sebagai bagian dari perwujudan cita-cita umat manusia (Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, 1986).

Durkheim tidak melihat moralitas hanya sebagai masalah pengendalian. Unsur kedua di dalam moralitas ialah *kolekatan* kepada kelompok-kelompok sosial--aspek positif komitmen kelompok yang sukarela dan hangat--tidak berasal dari kewajiban eksternal, tetapi dari kekuatan yang sukarela. Berkaitan dengan hal ini, Durkheim menyatakan:

Masyarakat yang seseorang anggap sebagai bagian paling penting dari diri seseorang. Dari sudut pandang tersebut, orang siap melihat bagaimana masyarakat menjadi hal yang melihat seseorang. Sebenarnya, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat tanpa memotong diri seseorang dari diri seseorang sendiri. Di antara masyarakat dan seseorang ada hubungan yang paling kuat dan paling intim., karena masyarakat adalah bagian dari keberadaan seseorang, karena di dalam arti tertentu masyarakat merupakan hal yang terbaik dalam diri seseorang.... Akibatnya...ketika seseorang menjaga diri seseorang sendiri seseorang menjaga sesuatu selain diri seseorang...oleh karena itu sebagaimana moralitas membatasi dan mengandalkan seseorang, untuk memenuhi syarat-syarat hakikat seseorang, begitu jugalah dalam mengharuskan komitmen seseorang dan mensubordinasikannya kepada kelompok, masyarakat benar-benar memaksa seseorang mewujudkan diri seseorang sendiri (Emile Durkheim, 1925).

Kedua unsur moralitas ini--disiplin dan kelekatan--saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain karena mereka hanyalah aspek-aspek masyarakat yang berbeda. Disiplin adalah masyarakat dilihat mengajukan tuntutan kepada seseorang, dan kelekatan adalah masyarakat dilihat sebagai bagian dari seseorang.

3. Otonomi atas Nasib Sendiri

Elemen ketiga moralitas ialah *otonomi*. Durkheim mengikuti definisi filosofis Kant dan melihatnya sebagai suatu dorongan hati berbasis rasional dari keinginan dan kehendak, dengan simpul sosiologis bahwa pendasaran rasional pada akhirnya bersifat sosial. Menurut Emanuel Kant otonomi merupakan prinsip moralitas. Dalam kenyataannya, moralitas tercapai dengan mewujudkan tujuan-tujuan impersonal dan umum, yang tidak tergantung pada suatu pribadi dan kepentingan individu. Padahal nalar, berdasarkan hakikat bentukannya, diarahkan kepada hal-hal yang umum dan impersonal, sebab ia sama bagi semua orang, bahkan bagi semua makhluk yang mempunyai nalar. Hanya ada satu nalar. Karena itu bila seseorang bertindak berdasarkan nalar, seseorang sesungguhnya melakukan tindakan moral dengan kebebasan penuh karena seseorang memang sekedar mengikuti hukum dari hakikat penalaran seseorang. Kalau demikian halnya, dari mana asalnya perasaan mengenai kewajiban itu? Ini karena dalam kenyataannya seseorang bukan hanya makhluk rasional semata-mata, melainkan juga makhluk yang memiliki perasaan. Watak merupakan ciri yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Kegembiraan saya adalah milik saya sendiri dan hanya mencerminkan watak saya pribadi. Oleh karena itu kepekaan seseorang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang individual, egoistis, irrasional, dan immoral. Di antara hukum nalar dan watak seseorang terdapat suatu antagonisme yang sangat besar, dan karena itu hukum nalar hanya bisa diterapkan pada watak melalui paksaan nyata. Perasaan akan adanya paksaan itulah yang menimbulkan naluri tentang adanya kewajiban. Bagi Tuhan, semua adalah nalar, dan tidak ada tempat bagi perasaan-perasaan semacam itu. Bagi Dia moralitas terlaksana dengan spontanitas yang sepenuhnya bersifat otonom. Namun tidak

demikian halnya bagi seorang manusia, makhluk kompleks dan heterogen yang memiliki sekian banyak sifat dalam dirinya sendiri.

Dari sudut pandangan ini kewajiban atau disiplin hanya sekedar merupakan ciri tambahan dari hukum-hukum moral. Pada dirinya sendiri hukum-hukum moral tidak perlu bersifat imperatif, dan hanya akan menampilkan sifat tersebut bila dalam keadaan konflik dengan watak, bila harus menjalankan otoritas untuk mengatasi perlawanan yang bertubi-tubi. Namun hipotesa samaam ini secara keseluruhan bersifat arbitrer. Kewajiban merupakan unsur hakiki bagi setiap perintah moral, dan kami telah mengemukakan alasan-alasannya. seluruh kodrat seseorang mempunyai kebutuhan untuk dipaksa, diikat, dibatasi, baik kodrat intelektual maupun kodrat emosional seseorang. Dalam kenyataannya, nalar bukan suatu kekuatan transenden, melainkan merupakan bagian dari alam dan dengan sendirinya juga tunduk kepada hukum-hukum alam. Alam semesta ini terbatas, dan semua pembatasan mengisyaratkan adanya kekuatan-kekuatan yang membatasi. Lebih jauh lagi, untuk memahami kehendak yang benar-benar otonom. Kant harus mengakui bahwa kehendak, sejauh bersifat rasional murni, tidak tunduk kepada hukum alam. Ia harus menjadikannya suatu kekuatan yang terpisah dari dunia, di mana alam tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Hanya mengandalkan pada kekuatan dirinya sendiri, kehendak tersebut terhindar dari berbagai pengaruh kekuatan luar (Emile Durkheim, 1925).

Fokus Durkheim pada masyarakat sebagai sumber moralitas telah menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa sektor idealnya adalah orang yang hampir seluruhnya dikendalikan dari luar--seorang konformis total. Akan tetapi, Durkheim tidak menganut pandangan aktor yang eksteren, seperti itu: "konformitas tidak boleh didorong hingga ke titik yang menundukkan intelek secara lengkap. Karena itu, konformitas tidak berasal dari suatu kepercayaan akan perlunya disiplin yang harus membuta dan membudak. Mitos-mitos dan simbol-simbol yang digunakan oleh sistem-sistem moral sebelumnya untuk menuntut disiplin dan dorongan kelekatan. Durkheim percaya bahwa

kini mitos-mitos tersebut telah berlalu, hanya pengertian ilmiah saja yang dapat memberikan fondasi untuk otonomi moral. Khususnya, moralitas modern harus didasarkan pada hubungan antara individu dan masyarakat seperti yang disimpulkan oleh ilmu Durkheim yang baru yaitu sosiologi. Satu-satu cara agar pengertian sosiologi tersebut menjadi moralitas yang sejati adalah melalui pendidikan.

Otonomi mencapai daya penuhnya di dalam modernitas hanya seiring dengan kemunduran mitos-mitos dan simbol-simbol yang digunakan oleh sistem-sistem moral sebelumnya untuk menuntut disiplin dan mendorong kelekatan. Durkheim percaya bahwa kini mitos-mitos tersebut telah berlalu, hanya pengertian ilmiah saja yang dapat memberikan fondasi untuk otonomi moral. Khususnya, moralitas modern harus didasarkan pada hubungan antara individu dan masyarakat seperti yang diungkapkan Durkheim yang baru yaitu sosiologi. Satu-satu cara agar pengertian sosiologi tersebut menjadi moralitas yang sejati adalah melalui pendidikan.

B. Nurani Kolektif

Durkheim mencoba menguraikan minatnya kepada moralitas umum dengan berbagai cara dan dengan konsep-konsep yang berbeda. Dalam usaha awalnya menangani isu tersebut, Durkheim mengembangkan ide mengenai *nurani kolektif* (*collective conscience*). Dalam bahasa Prancis, kata *collective conscience* berarti baik "*conscience*" (kesadaran) maupun "nurani moral". Durkheim mencirikan nurani kolektif sebagai berikut:

Totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang lazim bagi rata-rata warga masyarakat yang sama yang membentuk suatu sistem tertentu yang mempunyai kehidupannya sendiri, orang dapat menyebutnya nurani kolektif atau nurani bersama..., oleh karena itu, nurani kolektif adalah hal yang berbeda sama sekali dari nurani-nurani khusus, meskipun ia dapat disadari melalui nurani-nurani khusus itu.

Ada beberapa titik tekan dalam definisi di atas, yaitu: pertama, Durkheim menganggap bahwa nurani kolektif sebagai hal yang terjadi di seluruh masyarakat teretntu, *Kedua*, Durkheim membaynagkan dengan jelas nurani kolektif

sebagai hal yang independen dan mampu menentukan fakta-fakta sosial yang lain. ia bukan suatu pentulan dari basis material seperti yang dianjurkan Marx. Akhirnya, meskipun dia menganut pandangan mengenai nurani kolektif yang demikian, Durkheim juga menulis mengenai "kesadaran atasnya" melalui kesadaran individu.

Nurani kolektif mengacu kepada struktur umum pengertian-pengertian norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini bersama. Nurani kolektif merupakan suatu konsep yang serba mencakup dan tidak berbentuk. Durkheim mempergunakan konsep itu untuk menyatakan masyarakat "primitif" mempunyai suatu nurani kolektif yang lebih kuat-yakni pengertian-pengertian norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang lebih banyak diyakini bersama-dari pada masyarakat modern. (George Ritzer, 2012).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Usaha-usaha Durkheim yang paling konsisten untuk memperbaharui masyarakat untuk memungkinkan terwujudnya moralitas modern, diarahkan pada pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh Durkheim sebagai proses yang ditempuh sang individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual, dan yang paling utama bagi Durkheim, alat-alat moral, yang dibutuhkan agar dapat berfungsi di dalam masyarakat. Durkheim selalu percaya "bahwa hubungan ilmu sosiologi dengan pendidikan ialah hubungan teoritik dengan praktek". Pada 1902, dia diberi posisi yang kuat sebagai kepala departemen pendidikan Sarbonne. "Hampir tidak berlebihan mengatakan bahwa setiap pikiran orang muda di Paris, dalam dasawarsa sebelum perang Dunia I, secara langsung atau tidak langsung, berada di bawah pengaruhnya.

Sebelum Durkheim mulai pembaharuan pendidikan, sudah ada dua pendekatan, pendekatan yang satunya melihat pendidikan sebagai perluasan gereja, dan pendekatan lainnya melihat pendidikan sebagai pembentangan individu alamiah. bertentangan dengan itu, Durkheim berargumen bahwa pendidikan harus membantu anak-anak mengembangkan suatu sikap moral terhadap masyarakat. Dia percaya

bahwa sekolah-sekolah hampir merupakan satu-satunya lembaga yang ada yang dapat memberi suatu fondasi sosial bagi moralitas modern.

Bagi Durkheim ruang kelas adalah masyarakat kecil dan dia menyimpulkan bahwa semangat-tinggi kolektifnya dapat dibuat cukup kuat untuk menanamkan sikap moral. Ruang kelas dapat memberikan cukup kuat untuk menanamkan sikap moral. Ruang kelas dapat memberikan lingkungan pergaulan kolektif yang diperlukan untuk menghasilkan kembali representasi-representasi kolektif.¹ Hal ini akan memungkinkan pendidikan menghadirkan dan memproduksi kembali ketiga elemen moralitas sekaligus.

Pertama, pendidikan akan memberikan para individu disiplin yang mereka butuhkan untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang mengancam menelan mereka. *Kedua*, pendidikan dapat mengembangkan rasa kesetiaan siswa terhadap masyarakat dan terhadap sistem moralnya. Yang paling penting adalah peran pendidikan di dalam pengembangan otonomi, yang membat disiplin "yang diinginkan secara bebas", dan kelekatan terhadap masyarakat berdasarkan "persetujuan yang tercerahkan".

Mengajarkan moralitas bukan dengan berkhotbah atau indoktrinasi, melainkan dengan menjelaskan. Jika seseorang menolak memberikan semua penjelasan jenis itu kepada anak-anak, jika seseorang tidak mencoba membantu mereka memahami alasan-alasan mengapa aturan-aturan itu perlu dipatuhi, seseorang akan menyalahkan mereka sebagai orang-orang yang mempunyai moralitas yang tidak lengkap dan inferior.

5. DAFTAR PUSTAKA

Emile Durkheim, *Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education*. Diterjemahkan dari Bahasa Perancis oleh Everett K. Wilson dan Herman Schnurer. New York, The Free Press: 1973)

- Emile Durkeim, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Disunting oleh Taufik Abdullah dan A.C van der Leeden, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 1986) .
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* Diterjemahkan Alamandan, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012).
- Hizam, I., & Baharudin. (2022). Peran Kekuasaan Dalam Pendidikan. *SOCIETY*, 13(1), 47-52.
<https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5275> (Original work published June 29, 2022)
- Malik, A., & Dewi, R. K. (2021). Pendidikan Yang Membebaskan Dan Konsep Tentang Potensi Manusia. *SOCIETY*, 12(2), 112-123. Retrieved from <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/society/article/view/3401>
- Suhartini, S., & Baharudin, B. (2021). Nilai-Nilai Sosial Dalam Budaya Maulidan Suku Sasak Bayan Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *SOCIETY*, 12(1), 45-58.
<https://doi.org/10.20414/society.v12i1.3396>
- Taufik Abdullah dan A.C van der Leeden, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 1986)